

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren pada Bab I Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia sertamemegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pondok pesantren mulai di kenal di Indonesia sejak zaman Walisongo. Pada saat itu Padepokan Sunan Ampel lah yang dianggap sebagai awal berdiri atau tumbuhnya pesantren yang ada di Indonesia. Padepokan Sunan Ampel didirikan oleh Sunan Ampel di Jawa sebagai pusat pendidikan keagamaan. Meskipun menjadi pusat pendidikan yang berada di Jawa para santri yang datang untuk menuntut ilmu di padepokan Sunan Ampel bukan hanya orang-orang yang berasal dari pulau jawa, ada diantaranya yang juga datang dari beberapa daerah di luar pulau jawa seperti Gowa dan Talo, Sulawesi. Saat itu pesantren hadir khusus sebagai sarana untuk mencari pengetahuan mengenai ilmu keagamaan yang nantinya para santri yang telah menjalankan pendidikan keagamaannya bertugas untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh Nusantara dengan berbagai cara yang sesuai dengan syari'at agama seperti dengan cara berdakwah dan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan tuntutan dan tuntutan agama.

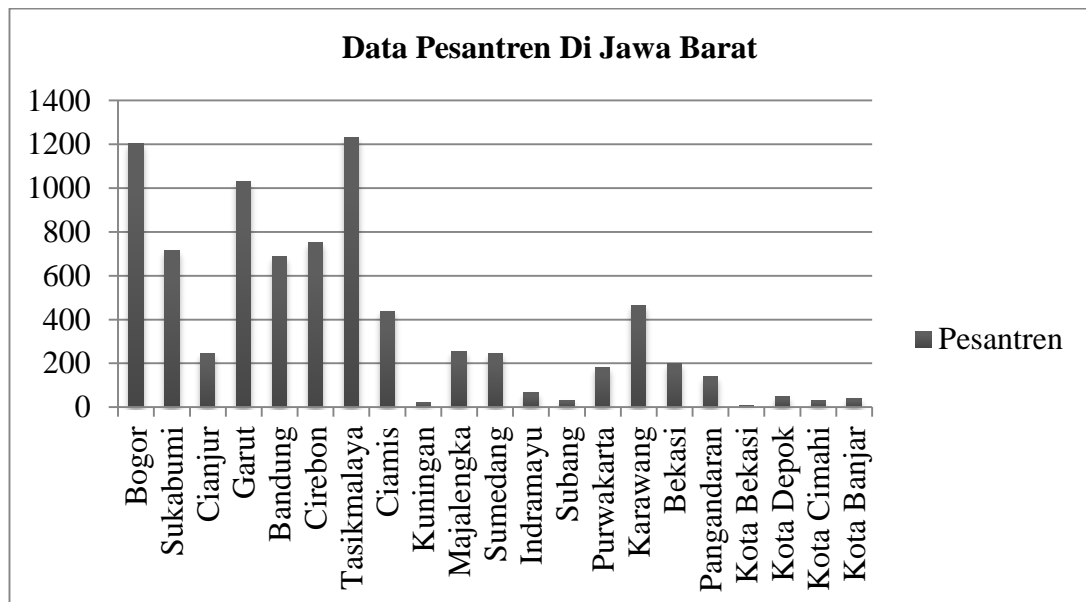
Pendidikan pesantren banyak memberikan pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat khususnya yang ada di Indonesia hal ini berdasarkan sejarah perkembangan pesantren dari mulai masa kolonial hingga sekarang. Banyak dari

para pemimpin yang bermunculan di era sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia merupakan bibit-bibit bangsa yang dihasilkan dari pendidikan pesantren seperti KH. Hasyim Asy'ari, Kyai Wahid Hasyim, bapak Abdurrahman Wahid dan masih banyak lagi tokoh-tokoh masyarakat yang merupakan lulusan atau alumni dari pondok pesantren.

Pada beberapa tahun yang lalu saat awal adanya pesantren di Indonesia, pesantren merupakan tempat pembelajaran yang terfokus pada pembelajaran keagamaan. Namun seiring berjalannya waktu, pendidikan pesantren bukan hanya pendidikan berbasis keagamaan tetapi juga lulusan pesantren harus mampumenguasai pelajaran umum sebagai mana pelajaran yang ada pada kurikulum pembelajaran di sekolah formal. Dengan tetap memegang prinsip utama pesantren yaitu *al-muhafazah 'ala al-qadim as-salih wa alakhz bi al-jadid al-aslah* (tetap memegang tradisi yang positif dan mengambil hal-hal baru yang positif), Sebagai tanggapan pesantren yang merupakan lembaga pendidikan non formal yang bergerak dalam bidang ilmu keagamaan saat ini sudah banyak pesantren yang merubah pola pendidikannya dari pendidikan tradisional ke pendidikan yang modern, tanpa menghilangkan unsur tradisional yang layak untuk di pertahankan dalam pendidikan pesantren. Salah satunya yaitu dengan tetap menjaga pembelajaran pesantren yang mengharuskan para santrinya untuk mondok (tinggal di lingkungan pesantren) dalam artian para santri (sebutan bagi warga belajar di pondok pesantren) di isolasi dari kehidupan yang telah ia jalani untuk kemudian di satukan dengan santri-santri lainnya yang berasal dari berbagai daerah dan juga berbagai karakter. Hal ini bertujuan untuk melatih santri bermasyarakat. Perkembangan pesantren pun terus berlanjut sampai saat ini.

Berdasarkan datayang diperoleh dari pangkalan data pondok pesantren ditpdpontren.kemenag.go.id hingga saat ini jumlah pondok pesantren yang tercatat ada di Indonesia sebanyak 26.562 pondok pesantren dan sebanyak 8.023 berada di Jawa Barat, jumlah ini sekaligus merupakan jumlah terbanyak lembaga pendidikan pondok pesantren yang tersebar di Indonesia dibandingkan dengan provinsi lainnya. Jumlah tersebut kemudian tersebar di semua kota dan kabupaten

yang ada di Jawa Barat. Berikut data yang diperoleh dari ditpdpontren.kemenag.go.id mengenai persebaran pesantren di Jawa Barat:



Gambar 1.1. Diagram Data Pesantren di Jawa Barat

(Sumber : Data ditpdpontren.kemenag.go.id, 2019)

Tidak dapat dipungkiri, selain asupan rohani (ilmu keagamaan) santri juga membutuhkan asupan ekonomi, hal ini untuk menunjang keberlanjutan program pendidikan yang ada di pondok pesantren, yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan. Selama ini pendanaan untuk pembangunan pesantren dilakukan oleh Yayasan/lembaga yang terlibat dalam pembangunan pesantren, para donatur yang mengamalkan hartanya untuk kemajuan umat beragama serta orangtua yang menitipkan anaknya untuk menuntut ilmu ditempat tersebut. Hal ini menjadi salah satu penunjuk bahwa pesantren belum mandiri, sehingga keberlangsungan pembelajaran kemungkinan akan mengalami hambatan. Misal, kurangnya bangunan penunjang pendidikan karena hambatan dana, atau pihak pesantren harus menunggu bahkan ada yang harus mendatangi masyarakat untuk meminta bantuan dana untuk pembangunan penunjang pendidikan pesantren, yang pada akhirnya dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan menimbulkan spekulasi-spekulasi negatif atau bahkan dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan di era ini tak jarang orang menganggap kebutuhan

ekonomi sebagai kebutuhan yang paling tinggi dibandingkan dengan kebutuhan religi / keagamaan.

Pesantren saat ini dituntut agar lebih kreatif, berkembang dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang ada hingga saat ini, sehingga pesantren tidak dianggap lagi sebagai pendidikan yang kuno/ tertinggal, dan mempunyai banyak keunggulan yang bisa dibanggakan dan mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Banyaknya Pondok Pesantren di Jawa Barat inilah yang menjadi sebuah pertimbangan akan patut diadakannya kegiatan dengan melibatkan sumber daya manusia yang tersebar di pondok pesantren di Jawa Barat yang tentunya memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Selain itu, sebagian besar pesantren di Jawa Barat belum mampu mandiri secara ekonomi untuk membiayai kebutuhan operasional maupun pengembangan sarana dan prasarana pesantren. Sehingga perlu adanya sebuah program yang mampu mengangkat perekonomian pesantren, bahkan mampu mengangkat nama pesantren menjadi lebih baik lagi.

Pesantren sebagaimana diatur dalam UU No 18 Tahun 2019 memiliki fungsi diantaranya : Pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat telah diatur dalam pasal 43-46. Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur pada pasal 46 ayat 1-3 pemerintah pusat dan pemerintahan daerah memberikan dukungan dan fasilitas ke pesantren berupa bantuan keuangan, sarana dan prasarana, teknologi dan atau pelatihan keterampilan sesuai dengan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur Jawa Barat pada periode 2018-2023 telah meluncurkan program *one pesantren one product* (OPOP) sebagai upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dalam lingkungan keumatan Islam khususnya bagaimana pesantren bisa berdaya tanpa harus mengandalkan donasi dari orangtua siswa atau pemerintah. Pemberdayaan yang dilakukan adalah dengan membantu membangun kemandirian pesantren melalui pemberdayaan ekonomi dengan cara membantu pesantren dalam memilih komoditi yang laku di pasar, memberi pelatihan dan

pendampingan melalui para santri, masyarakat dan Pondok Pesantren itu sendiri, agar mampu mandiri secara ekonomi, sosial dan juga untuk memacu pengembangan skill, teknologi produksi, distribusi, pemasaran melalui sebuah pendekatan inovatif dan strategis dari Pemprov Jabar bersama Dinas KUKM Provinsi Jawa Barat, memastikan seluruh Pondok Pesantren di Jawa Barat dapat memperoleh akses atas program pemerintah dalam sektor pemberdayaan ekonomi, teknologi dan produksi yang efisien, tepat serta modern di era digital saat ini. Seluruh pesantren yang terpilih melalui seleksi nantinya akan diberikan program pembinaan terpadu dan juga ditingkatkan kemampuan daya saing ekonominya serta didampingi untuk proses pengembangan usahanya, bersinergi dalam jaringan bisnis yang potensial hingga mereka berhasil menjadi sebuah Pondok Pesantren yang mandiri.

Tasikmalaya sebagai kota yang memiliki julukan sebagai kota santri tercatat memiliki pesantren paling banyak yang ada di Jawa Barat yaitu dengan jumlah pesantren sebanyak lebih dari 1200 pesantren. Hingga saat ini, berdasarkan data yang diperoleh langsung dari *website* pop.jabarprov.go.id 107 diantaranya telah lolos pada seleksi tahap satu yang artinya telah menerima pendanaan untuk modal serta pengembangan usaha berupa pembuatan produk. Bahkan produk yang dibuat oleh para santri kini sudah mulai beredar di pasaran, dipajang dalam pameran-pameran dan menjadi komoditas lokal yang perlu dipertimbangkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini berfokus pada “Implementasi Program *One Pesantren One Product* Melalui Budidaya Jamur Tiram (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Nurul Wafa Sukarame, Singaparna Kabupaten Tasikmalaya).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan program *One Pesantren One Product* melalui budidaya jamur tiram di Pondok Pesantren Nurul Wafa?

- 2) Bagaimana peran pelatihan *One Pesantren One Product* terhadap berjalannya program *Budidaya Jamur Tiram* di Pondok Pesantren Nurul Wafa?

1.3 Definisi Operasional

1.3.1 Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan nonformal yang sudah ada sejak dahulu namun eksistensinya masih berlanjut hingga sekarang. Seiring dengan perkembangan zaman, bermunculan lembaga-lembaga pendidikan ataupun pelatihan yang dianggap lebih menjanjikan keberadaannya mengingat kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat.

1.3.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan demi mewujudkan masyarakat yang berdaya. Pemberdayaan di berikan sebagai sebuah upaya untuk memberdayakan masyarakat yang belum berdaya.

1.3.3 Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan adalah cara untuk menutup “*gap*” antara kecakapan atau kemampuan seseorang dengan permintaan atas kemampuan yang dimiliki dan meningkatkan efisiensi dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dari program yang telah dicanangkan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberdayakan santri dengan memberikan pelatihan dan pendampingan serta pendanaan pembuatan produk dalam program *one pesantren one product*.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian, penambah wawasan akademik mengenai pemberdayaan masyarakat, pelatihan, serta pemanfaatan sumber daya.

2) Kegunaan Praktis

a) Bagi peneliti

Kegiatan penelitian ini menjadikan sebagai pengalaman yang berharga dalam upaya meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan ilmu untuk menambah wawasan ataupun pengetahuan dalam pemberdayaan masyarakat.

b) Bagi pondok pesantren

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan penilaian dari berjalannya program *one pesantren one product* dalam meningkatkan kemandirian pesantren melalui santri dari segi ekonomi.

c) Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan cerminan terhadap berjalannya program pemerintah provinsi Jawa Barat yaitu *one pesantren one product*, sehingga program tersebut dapat semakin berkembang dan tepat sasaran.

d) Bagi Jurusan Pendidikan Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan penambah pengetahuan mengenai Pesantren sebagai lembaga pendidikan Non Formal, dan penerapan pemberdayaan masyarakat serta pelatihan yang menjadi salah satu fokus pendidikan masyarakat

e) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan atau acuan penelitian selanjutnya untuk program yang sama maupun sejenis.

Sehingga dapat memudahkan peneliti selanjutnya dalam membuat proposal, makalah atau laporan lainnya.

f) Bagi pencari informasi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih dalam memberikan dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai program yang diadakan pemerintah provinsi Jawa Barat dalam memberdayakan pesantren melalui pendampingan dan pelatihan berwirausaha.